



Article Informations
Corresponding Email:
camellia.sabrina883@gmail.com

Received: 28/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

ANALISIS PERAN UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI ANAK

Camellia Nur Sabrina

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Better Sexual Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (BERANI) sebagai salah satu upaya peran United Nations Population Fund (UNFPA) sebagai organisasi internasional dalam menangani isu kesehatan seksual dan reproduksi pada fase pertama program BERANI di tahun 2018-2023 yang berlanjut hingga fase kedua program yang dimulai pada tahun 2024 hingga tahun 2027 yang masih berjalan hingga saat ini. Studi kasus dilakukan di wilayah Jakarta Pusat karena wilayah tersebut menjadi salah satu tempat dimana program BERANI dilaksanakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, analisis dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BERANI yang dilaksanakan di Jakarta Pusat menjadi upaya peran UNFPA dalam menangani isu kesehatan seksual dan reproduksi pada usia anak hingga berlanjut hingga usia lanjut.

Program BERANI menjadi upaya yang dilakukan oleh UNFPA sebagai bentuk bantuan dalam penanganan isu kesehatan seksual dan reproduksi yang dibutuhkan oleh Indonesia termasuk daerah Jakarta Pusat. Meskipun tantangan masih ada, program tersebut memberikan harapan adanya peningkatan pada angka terpenuhinya hak kesehatan seksual dan reproduksi anak melalui edukasi.

Kata Kunci: Peran; *United Nations Population Fund (UNFPA)*, *Better Sexual Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (BERANI)*, Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Better Sexual Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (BERANI) program as one of the efforts of the United Nations Population Fund (UNFPA) as an international organization in dealing with sexual and reproductive health issues in the first phase of the BERANI program in 2018-2023 which continues to the second phase of the program starting in 2024 until 2027 which is still running today. The case study was conducted in the Central Jakarta area because the area is one of the places where the BERANI program is implemented.

The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews with related parties, document analysis, and literature studies. The results of the study show that the BERANI program implemented in Central Jakarta is an effort to play the role of UNFPA in addressing sexual and reproductive health issues in children until they continue into old age.

The BERANI program is an effort carried out by UNFPA as a form of assistance in handling sexual and reproductive health issues needed by Indonesia, including the Central Jakarta area. Although the challenges still exist, the program provides hope for an increase in the number of fulfillment of children's sexual and reproductive health rights through education.

Keywords: *Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Bookman Old Style 11 spasi tunggal, dan cetak miring]*

1. PENDAHULUAN

Dalam buku Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Yanuar Ikbar menjelaskan bahwa manusia dilindungi dari berbagai ancaman yang menimbulkan kehancuran terhadap fisik atau kepemilikan manusia yang dimana ancaman tersebut mampu merusak integritasnya sebagai seorang manusia. Menurut *The United Nations Development Programme* (UNDP), manusia dilindungi dari gangguan-gangguan yang terdapat pada pola kehidupan manusia sehari-sehari seperti selamat dari ancaman kelaparan, kesehatan, penindasan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam tujuh kategori keamanan yakni keamanan komunitas, ekonomi, lingkungan, makanan, kesehatan, pribadi, serta politik yang fokus pada keamanan dalam kebutuhan manusia diluar keamanan militer. UNDP mendefinisikan dua aspek yang berbeda yakni aspek keamanan dari ancaman yang dapat merusak fisik dan psikis manusia seperti penyakit. Menurut definisi dari Commission on Human Security, upaya yang digunakan dalam memberikan perlindungan hal inti atau vital yang terdapat pada kehidupan tiap manusia yang ditandai dengan adanya kebebasan dari gangguan yang mengancam hak-hak manusia serta dapat mengganggu manusia dalam mendapatkan hak-hak tersebut. Hal inti yang terdapat di kehidupan manusia adalah keamanan terhadap aspek kesehatan atau health security yang termasuk pada tujuh kategori keamanan manusia yang disebutkan oleh UNDP.

Salah satu fokus dalam health security dimana terdapat masalah pada kesehatan seksual dan reproduksi atau sexual reproduction health. Kesehatan seksual dan reproduksi yang baik ditandai dengan keadaan fisik,

mental, dan sosial manusia yang sejahtera pada semua yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia dimana manusia memiliki kehidupan seks yang aman serta mampu bereproduksi. Dalam upaya menjaga kesehatan seksual dan reproduksi, maka individu memerlukan akses pada informasi yang akurat mengenai metode kontrasepsi yang aman, efektif, terjangkau serta sesuai dengan pilihan yang mereka inginkan dan mendapatkan informasi yang tepat dalam melindungi diri dan penyakit yang memiliki potensi menginfeksi manusia lewat penyakit menular seksual. Kesehatan seksual dan reproduksi masih menjadi hal yang belum terimplementasikan dengan baik di Indonesia terbukti dengan masih banyak terjadinya fenomena kejahatan seksual seperti pernikahan di usia yang terlalu dini dan kehamilan yang tidak diinginkan terjadi pada anak-anak, remaja, dan bahkan disabilitas dimana hal ini terjadi dikarenakan edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi masih dinilai tabu. Masyarakat Indonesia kurang memperhatikan dan belum menyadari bahwa memiliki pengetahuan yang jelas mengenai kesehatan seksual dan reproduksi merupakan kebutuhan setiap orang tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang masih dalam rentang usia anak-anak. Faktor ketidaktahuan akan cara penyampaian yang tepat mengenai edukasi kesehatan seksual dan reproduksi menjadi salah satu faktor pemicu kurangnya perhatian terhadap pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, terutama jika audiensnya merupakan remaja atau bahkan anak-anak. Sedangkan berdasar pada pernyataan yang ada *pada International Conference on Population and Development (ICPD)* bahwa hak untuk mendapatkan edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi sekaligus pelayanan yang berkualitas adalah milik semua orang.

Sangat disayangkan apabila anak-anak Indonesia tumbuh dengan keadaan minim pengetahuan seharusnya mendapatkan bahkan sebelum anak-anak tersebut mencapai umur remaja yang mulai mengalami pubertas.

2. PEMBAHASAN

UNFPA atau *United Nations Population Fund* merupakan salah satu organisasi yang berdiri di bawah *United Nations General Assembly* atau

Majelis Umum PBB pada tahun 1969 yang bergerak dalam bidang pengendalian populasi dan kesehatan reproduksi di negara-negara berkembang. Tujuan UNFPA adalah untuk memastikan agar setiap kehamilan yang terjadi diinginkan, setiap kelahiran yang terjadi aman, setiap generasi muda bebas dari penyakit menular seksual HIV serta setiap wanita diperlakukan dengan terhormat dan bermartabat. Agar tujuan tersebut tercapai, maka UNFPA juga menyediakan berbagai akses pendidikan atau edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi sekaligus mendukung akses layanan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi.

UNFPA dan pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam bekerja sama pada bidang kesehatan seksual dan reproduksi, remaja dan anak-anak usia muda (*Adolescents and Youth*), kesetaraan gender (*Gender Equality*), pemberdayaan perempuan (*Women Empowerment*), dan pada bidang dinamika kependudukan (*Population Dynamics*) dan pada bidang dinamika kependudukan (*Population Dynamics*) yang mana tercantum pada Dokumen Kerja Sama (*Country Programme Document/CPD*) dan *Country Programme Action Plan/CPAP*.

Pada *Report of the Economic and Social Council for the year 1995* yang ditujukan khusus untuk Indonesia yang dibuat oleh *United Nations General Assembly, the United Nations Population Fund and the United Nations Office for Project Services* dengan nomor A/50/3/Rev.1 dijelaskan bahwa Indonesia membutuhkan bantuan pada bidang kesehatan seksual dan reproduksi sehingga UNFPA ditugaskan di Indonesia untuk mengatasi kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja dan anak-anak usia muda, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan dinamika kependudukan yang ada di Indonesia.

Dalam CPAP siklus 9 (2016-2020) terdapat 4 Outcome dengan 5 Output yang dilaksanakan ada hasil kerja sama yang salah satunya berfokus pada kesehatan reproduksi dan seksual. Perencanaan ini selanjutnya dilanjutkan pada kerja sama/CPAP siklus 10 (2021-2025) terdapat 4 Outcome dengan 5 Output sebagai hasil yang diharapkan dari kerja sama antara UNFPA dan pemerintah Indonesia tersebut yang pada bidang kesehatan seksual dan reproduksi yang diperluas.

Salah satu akses yang disediakan untuk Indonesia adalah hadirnya program yang bernama Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia atau yang disingkat menjadi program BERANI yang berjalan pada tahun 2018 hingga tahun 2023 di fase pertama. Program BERANI diadakan dengan tujuan agar generasi muda di Indonesia dapat terpenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan layanan dan informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi yang bisa didapatkan melalui sekolah maupun di luar sekolah. Generasi muda di Indonesia juga masih kesulitan dalam mendapatkan akses layanan serta edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi.

Dasar mengenai edukasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual yang diterima oleh anak-anak dan usia anak menjelang usia remaja di Indonesia ada pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tepatnya pada pasal 72 poin d, pasal 136 ayat 1, dan pasal 137 ayat 1 dan 2. Seharusnya pada saat usia anak-anak sebelum mengalami pubertas anak-anak di Indonesia sudah mendapatkan pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi beserta edukasi layanan terkait kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Dengan adanya program BERANI yang diselenggarakan, seharusnya kebutuhan akan edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dapat terpenuhi sekaligus mengalami peningkatan baik dalam segi kualitas pendidikan yang diberikan maupun kuantitas anak-anak yang mendapatkan pendidikan atau edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi.

Media edukasi sekaligus media informasi yang belum dikemas dalam akses yang mudah dijangkau oleh anak-anak hingga usia menjelang remaja, kurangnya fasilitas pelatihan secara langsung hingga materi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi yang masih dinilai tabu dan justru dinilai terlalu sensitif untuk diberikan pada anak-anak membuat akses pelayanan edukasi yang disediakan oleh UNFPA melalui program BERANI menjadi terhambat. Program pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi serta pelayanan kesehatan reproduksi terhambat karena edukasi mengenai alat kontrasepsi yang menjadi salah satu dari materi yang digunakan dalam akses edukasi

mengenai kesehatan reproduksi dan seksual mengalami penentangan dari guru sebagai pengajar.

Sebagai pemikir liberal pertama yang mencetuskan konsep hak asasi manusia, John Locke mengatakan bahwa hak dasar manusia seperti hak untuk melanjutkan hidup, hak merasakan kebebasan, serta hak untuk dapat memiliki yang diberikan oleh Tuhan tidak dapat dicabut oleh siapapun, oleh karena itu agar hak dasar alamiah manusia tersebut tidak terancam maka manusia membentuk suatu lembaga yang bertugas dalam menjaga hak dasar alamiah tersebut agar tidak terancam atau terganggu. Teori Liberalisme institusional menjadi teori yang dipilih oleh peneliti dimana Robert Keohane mengungkapkan bahwa sebuah institusi mampu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor serta mengimplementasikan komitmen yang ada dimana kepentingan nasional dapat menyesuaikan dengan norma dari institusi tersebut. Norma yang digunakan dalam liberalisme institusional adalah sebagai dorongan adanya kepatuhan terhadap komitmen, menstabilkan interaksi antar negara dibantu dengan organisasi internasional dalam menciptakan keteraturan sekaligus mengurangi konflik, dan membangun kepercayaan antar negara agar merasa lebih aman untuk melakukan kerja sama.

Dalam tahap penugasan dan pengawasan, UNFPA berada di bawah naungan Economic and Social Council (ECOSOC) yang merupakan salah satu badan yang terdapat di PBB dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi, dan pembangunan. ECOSOC memberikan arahan untuk UNFPA melalui Commission on Population and Development/CPD atau Komisi Kependudukan dan Pembangunan. Mandat UNFPA ditetapkan oleh ECOSOC pada tahun 1973 dan ditegaskan kembali pada tahun 1993 untuk dapat membangun pengetahuan dan membangun kapasitas dalam memenuhi kebutuhan di bidang kependudukan dan keluarga berencana, meningkatkan kesadaran dalam negara-negara maju sekaligus berkembang mengenai isu-isu mengenai kependudukan dan strategi dalam mengatasinya, dapat memberikan bantuan dalam mengatasi isu-isu mengenai kependudukan dan sarana yang menyesuaikan dengan kebutuhan negara, juga menjadi peran

utama dalam sistem PBB untuk mempromosikan program terkait kependudukan.

Berdasarkan norma yang digunakan liberalisme institusional terdapat norma hubungan kausalitas dalam organisasi internasional yang merujuk pada prinsip sebab-akibat yang diterapkan pada hubungan serta interaksi antar aktor internasional yang dimana penting dalam menentukan tanggung jawab atas tindakan yang menimbulkan akibat dalam konteks perjanjian internasional yang berdasar pada inkubasi norma kesehatan seksual dan reproduksi yang beracuan pada proses bagaimana norma-norma sosial yang memiliki kaitan dengan seksualitas sekaligus reproduksi yang dibentuk, dipelajari, serta diinternalisasi oleh individu dalam suatu kelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap sekaligus pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal kesehatan seksual dan reproduksi.

Oleh karena itu, UNFPA kemudian dibentuk karena adanya isu-isu terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang ada pada negara-negara anggota PBB yang kemudian negara-negara tersebut menyampaikan isu yang sama dalam sebuah konferensi yang dinamakan International Conference on Population and Development atau ICPD agar bantuan yang dibutuhkan oleh negara-negara tersebut dapat ditampung di sekretariat PBB. Norma-norma dalam UNFPA mencerminkan prinsip dalam kesehatan seksual dan reproduksi serta hak asasi manusia sekaligus kesetaraan gender secara keseluruhan di lingkup global dimana konflik mengenai populasi dan kesehatan seksual reproduksi dapat diminimalisir dengan adanya UNFPA seperti norma hak kesehatan seksual dan reproduksi dimana negara dan masyarakat dalam lingkup internasional wajib memiliki jaminan sekaligus melindungi hak kesehatan seksual dan reproduksi melalui kebijakan serta layanan berkualitas, norma kesetaraan gender dimana negara mampu memberdayakan perempuan dan anak pada lingkup sosial, ekonomi serta politik, dan norma solidaritas internasional dimana adanya tanggung jawab dalam mendukung pembangunan manusia di dunia dengan adil dan setara.

Menurut Bennet, organisasi internasional dapat menyediakan sarana yang dapat memberikan keuntungan bagi negara dalam penelitian ini UNFPA

menyediakan sarana yakni diadakannya program BERANI yang dapat menguntungkan dengan terpenuhinya hak kesehatan dan reproduksi di Indonesia sekaligus mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak kesehatan dan reproduksi pada anak.

3. KESIMPULAN [Bookman Old Style 12 dicetak tebal]

United Nations Population Fund atau UNFPA menjadi salah satu organisasi internasional dibawah PBB atau *United Nations* yang bergerak di bidang kependudukan dan kesehatan reproduksi dan diberi mandat oleh PBB dalam memastikan setiap individu di dunia dapat memiliki dan menggunakan hak atas kesehatan seksual dan reproduksi salah satu hak tersebut ialah hak dalam menerima edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Melalui program *Better Sexual Reproductive Health and Rights All in Indonesia* atau program BERANI, UNFPA menunjukkan peran dominan sebagai aktor independen yang membantu pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan dan advokasi karena program BERANI akan sulit dalam membantu pemerintah Indonesia jika tidak ada kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung. Oleh karena itu, UNFPA melalui program BERANI bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang mendukung tersebut dapat terbit dan juga dapat digunakan oleh rekan-rekan bidan, guru, dan rekan-rekan yang bekerja dalam lingkup kesehatan seksual dan reproduksi dapat bekerja dengan dukungan kerangka hukum atau peraturan yang lebih spesifik agar dapat memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi anak dalam memperoleh edukasi kesehatan seksual dan reproduksi yang bisa digunakan oleh anak-anak hingga mereka menginjak usia remaja dan berlanjut hingga usia lanjut.

Hal tersebut dikarenakan mandat UNFPA pada dasarnya diperuntukkan agar pemerintah dapat terbantu dan UNFPA tidak bisa secara langsung membantu masyarakat dalam suatu negara. Selain itu, program BERANI hanya bisa berjalan secara maksimal apabila terdapat kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dapat mendukung berjalannya program. Sebagai aktor independen, UNFPA melalui program BERANI membantu pemerintah Indonesia dengan melakukan koordinasi bersama

pemerintah dan mitra kerja sama serta membantu dalam pembuatan kebijakan dan advokasi.

Kontribusi UNFPA dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi anak melalui program BERANI hingga saat ini telah sesuai dengan strategi yang dirancang dalam CPAP 9 dan CPAP 10. Namun dalam penerapan peran tersebut, UNFPA mengalami hambatan sehingga mengurangi tingkat efektivitas dari peran UNFPA di Indonesia seperti adanya efisiensi anggaran yang pada akhirnya harus memangkas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di program BERANI. Sehingga saat ini realisasi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi anak masih jauh dari harapan dan berhubungan sulitnya pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi anak melalui layanan edukasi yang diimplementasikan oleh program BERANI.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA [Bookman Old Style 12 dicetak tebal]

- Academic, Oxford. Causation in the Law of State Responsibility British Yearbook of International Law. 27 January 2022. 20 August 2025.
- Aini, Lutfia Nur. "Peran UNFPA dan UNICEF dalam Pemenuhan dan Peningkatan Kesehatan Seksual Reproduksi Perempuan dan Anak Perempuan di Indonesia melalui Program "BERANI" Pada Tahun 2018-2023." Skripsi Universitas Sebelas Maret (2024): 3.
- Drs. Yanuar Ikbar, MA.,Ph.D. Metodologi dan Teori Hubungan Internasional. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Fund, United Nations Population. About Us. 3 August 2023. 26 April 2025.
- . International Conference on Population and Development. 17 July 2025. 19 August 2025.
- . UNFPA in the UN System. 24 September 2020. 17 July 2025.
- Gregoratti, Catia. "Human Security Political Science." Encyclopedia Britannica (2013): 1.
- Husada, Institut Kesehatan Deli. Kesehatan Seksual dan Reproduksi Fakultas Kebidanan. 6 February 2024. 20 August 2025.
- Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. Kemenkes RI. 17 July 2019. 28 July 2025.
- Iqlima, Diana. "Peran United Nations Population Fund (UNFPA) dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Kasus: Pencegahan Penularan HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2012-2017 ." Skripsi (2019): 1.
- Jackson, Robert and Georg Sorensen. Introduction to International Relations Fifth Edition. New York: Oxford University Press Inc, 2013.
- Jiwani, Dian Justicia. "Kerjasama UNICEF-UNFPA dalam Mencegah Perkawinan Anak di India Tahun 2016-2019." Jurnal Cahaya Mandalika (2021): 1.

- Nations, United. Report of the Economic and Social Council for the year 1995. General Assembly Official Records Fiftieth Session. New York: United Nations, 1996.
- . Sustainable Development . 26 April 2024. 15 May 2025.
- Nugroho, Bambang Wahyu. Theory Talks Perbincangan Pakar Sedunia tentang Teori Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, 2012.
- Organization, World Health. Sexual Reproductive Health and Rights. 14 September 2014. 21 July 2025.
- Perwita, Anak Agung Banyu and Yayan Mohammad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.
- . Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- UNFPA. Booklet Informasi Program BERANI Berdaya 2018-2023. Jakarta: UNFPA, 2023.
- UNICEF. UNICEF Data. 4 April 2025. 23 July 2025.
- Viotti, Paul R. and Mark V. Kauppi. International Relations Theory Fifth Edition. Harlow: Pearson Education Limited, 2014.
- Widihastuti, Asti Setiawati. Wawancara Peran UNFPA melalui implementasi program BERANI Camellia Nur Sabrina. 3 June 2025.
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman and Wawan Budi Darmawan. "Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3) ." Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (2023): 1.
- Zusy, Caitlin. History of the UNFPA. 25 May 2013. 17 July 2025 .